

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Pada bagian landasan teori ini, penulis akan menguraikan mengenai teori - teori yang akan digunakan dalam menganalisis objek penelitian. Adapun beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah; Konsep Keamanan Nasional, Konsep Perubahan Sosial, Teori Konflik Sosial, serta Teori *Human Need*. Berikut merupakan penjabaran dan penjelasan terkait dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.1. Keamanan Nasional

Keamanan nasional dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang memproduksi dan menciptakan rasa aman, didalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tentram dan tertib. Kondisi keamanan semacam inilah yang merupakan inti kebutuhan dasar manusia disamping kesejahteraan. Keamanan Nasional juga diartikan sebagai suatu kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa bernegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, serta militer untuk menghadapi berbagai ancaman internal dan external. Di lain pihak, Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua, mengembangkan konsep keamanan nasional merujuk pada kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi dan militer dan perjalanan diplomasi, baik dalam damai dan perang.

Selanjutnya berdasarkan “*2000 Russian National Security Concept*” , konsep keamanan nasional rusia meliputi penjaminan keamanan dalam

Negara Federasi yang meliputi individu, masyarakat, dan negara dari ancaman internal maupun eksternal, serta menitikberatkan pada stabilitas dalam negeri dan perbatasan negara. Sedangkan menurut pemerintah Australia, Perdana Menteri Kevin Rudd, keamanan nasional adalah bebas dari ancaman atau serangan, menjaga integritas teritorial, menjaga kedaulatan politik, melestarikan kebebasan, dan memelihara kemampuan fundamental ekonomi untuk memajukan kesejahteraan ekonomi seluruh rakyat Australia dengan menitikberatkan pada stabilitas kawasan Asia-Pasifik.

Dari uraian diatas dapat disintesisakan bahwasanya keamanan nasional adalah suatu kemampuan untuk menjaga dan melindungi negara dari segala ancaman yang ada untuk bertahan hidup. Kemampuan ini meliputi berbagai aspek yang ada di kehidupan bernegara dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan jaman. Hal ini dibuktikan dengan beberapa perihal mengenai keamanan nasional yang berubah yaitu permasalahan di dalam keamanan nasional itu sendiri yang dahulu hanya berdimensi militer (konvensional), menjadi multidimensi (kontemporer) dengan berbagai isu yang lebih kompleks lagi. Kemudian, paradigma keamanan nasional yang berorientasi pada negara juga mulai beralih menjadi orientasi masyarakat seiring dengan datangnya era globalisasi yang mengedepankan hak asasi manusia.

Seluruh perubahan tersebut kemudian menggeser persepsi ancaman secara global yang meningkatkan kompleksitas penguraian / penyelesaian dari ancaman itu sendiri. Jika sebelumnya persepsi ancaman hanya yang nyata (riil) saja, sekarang ini keamanan nasional juga perlu menghadapi ancaman tidak nyata (laten). Selain itu, dengan berkembangnya teknologi informasi komunikasi memunculkan berbagai isu yang seringkali berpotensi sebagai pemicu konflik sosial dan mengancam keamanan nasional. Terlebih

jika kita menimbang kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk (*plural*) meningkatkan kerentanan akan konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan nasional. Konflik sosial sebagai ancaman juga selaras dengan pendapat Barry Buzan (2008) yang membagi sector keamanan nasional menjadi 5 yaitu; keamanan militer, politik, ekonomi, sosial, serta keamanan lingkungan.

Sudut pandang keamanan nasional dalam penelitian ini meliputi persiapan pemindahan ibukota yang bebas dari konflik sosial dalam rangka menciptakan kestabilan keamanan nasional dalam negeri. Maka dari itulah, keamanan nasional menjadi salah satu pokok utama dalam objek penelitian ini. Dengan melihat potensi konflik sosial dalam pemindahan ibukota sebagai wujud upaya pencegahan ancaman keamanan serta sebagai rujukan saran membangun bagi pemerintah, diharapkan dapat menyempurnakan rencana pemindahan ibukota kedepannya.

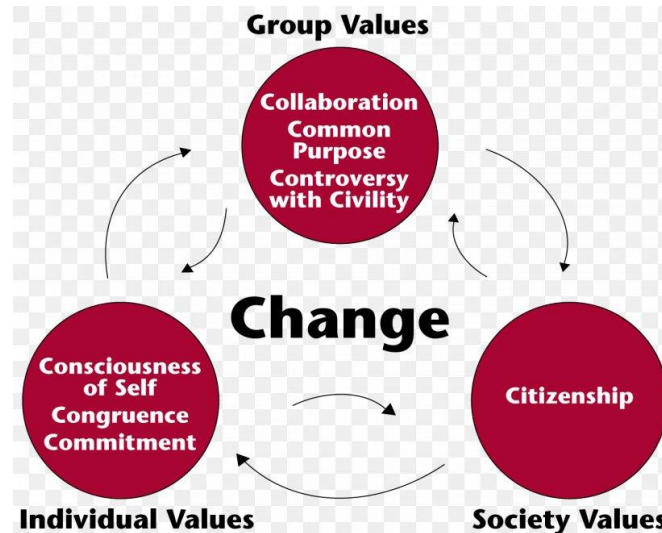
2.1.2. Konsep Perubahan Sosial

Perubahan merupakan suatu hal yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung secara cepat atau mendadak, maka perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial (Liliweri, 2009: 64). Wilbert More memandang perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial, dimana terdapat pola - pola perilaku maupun interaksi sosial dan mencakup norma, nilai, dan fenomena kultural (Giddens, 2004: 84). Ketika terdapat suatu perubahan di dalam struktur dan fungsi dari sistem sosial, maka hal tersebut dapat didefinisikan sebagai perubahan sosial (Hanafi, 1984: 16).

Sejalan dengan pengertian sebelumnya, Mac Iver mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan - perubahan yang ada dalam hubungan

sosial (*social relationships*) ataupun sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial itu sendiri. Sedangkan Gillin mengatakan perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik dikarenakan perubahan - perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideology, maupun karena terdapat difusi ataupun penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat (Hooguelt, 1995: 56).

William F.Ogburn kemudian mengemukakan ruang lingkup perubahan sosial tersebut memiliki unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat *material* maupun *immaterial*, dimana terdapat pengaruh besar unsur kebudayaan material terhadap unsur immaterial. Selain itu, Samuel Koenig berpendapat bahwa perubahan sosial menunjukkan terjadinya modifikasi - modifikasi dalam pola - pola kehidupan manusia (Hooguelt, 1995: 57).



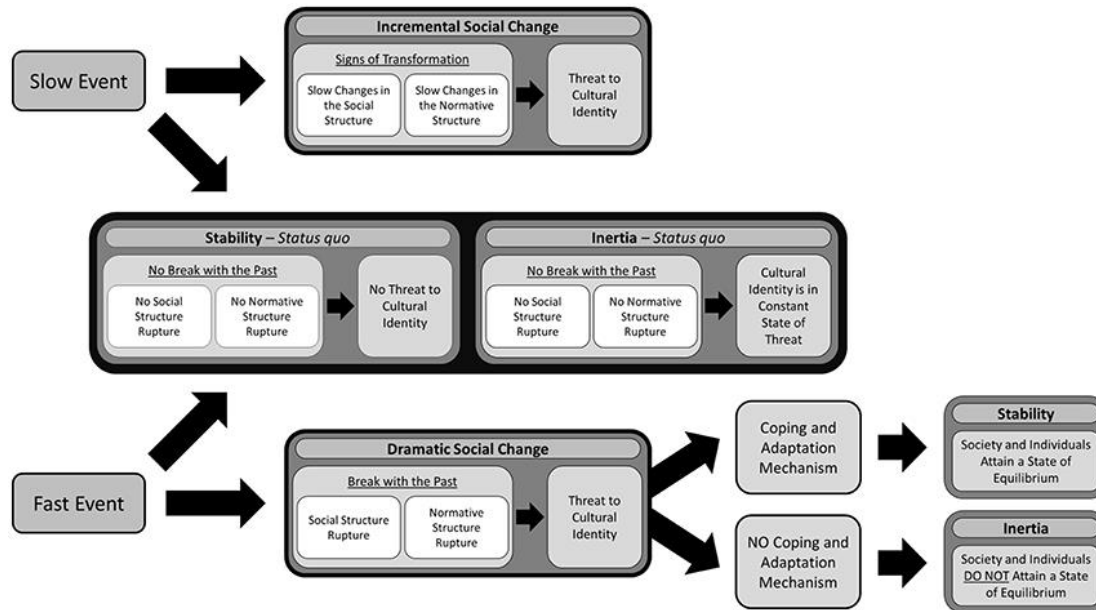
Gambar 1. Perubahan Sosial dalam Masyarakat

Selanjutnya berdasarkan Himes dan Moore, perubahan sosial memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu; dimensi struktural yang mana melihat perubahan mengacu ke dalam bentuk struktur masyarakat, meliputi perubahan dalam

peran sosial, munculnya peran baru, perubahan struktur dalam kelas sosial, serta perubahan didalam lembaga sosial; kedua adalah dimensi kultural yang mengacu pada perubahan kebudayaan di tengah masyarakat itu sendiri, seperti inovasi kebudayaan (dimana komponen internal yang memunculkan perubahan), maupun integrasi kebudayaan (penyatuan unsur - unsur kebudayaan yang berbeda untuk kemudian menghasilkan kebudayaan baru); dan terakhir dimensi interaksional, perubahan hubungan sosial dalam masyarakat yang meliputi frekuensi dalam berinteraksi, jarak sosial, perantara interaksi, maupun perubahan bentuk interaksi (Martono, 2011: 6).

Menurut Everett M. Rogers dan F. Floyd Shoemaker, perubahan sosial merupakan proses terjadinya perubahan struktur dan fungsi dalam sistem sosial. Struktur suatu sistem tersebut terdiri dari berbagai status, baik individu maupun kelompok – kelompok sosial, yang mana berfungsi apabila memiliki status - status tersebut menjalankan seperangkat peranan dan perilaku nyata. Sedangkan status dan peran tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain tidak bisa dipisahkan (Rogers, Everett & Shoemaker, F. Floyd, 1987: 16).

Rogers juga melihat perubahan ini menjadi 3 (tiga) tahapan diantaranya; Inovasi yaitu proses ide - ide baru diciptakan serta dikembangkan; Difusi, proses dimana ide-ide baru itu kemudian dikomunikasikan kedalam sistem sosial; dan kemudian Konsekuensi yaitu hasil akhir dari proses perubahan, yang mana dapat terjadi dampak negatif jika penggunaan atau terdapat penolakan ide baru tersebut. Hal ini membuktikan bahwa perubahan sosial merupakan akibat komunikasi sosial yang tergantung baik atau buruknya proses komunikasi itu berlangsung (Rogers, Everett & Shoemaker, F. Floyd, 1987: 16).



Gambar 2. Skema Perubahan Sosial

2.1.3. Teori Konflik Sosial

Tidak dapat dipungkiri, konflik merupakan sesuatu yang tidak akan hilang selama terdapat dua ataupun lebih individual di muka bumi ini. Sehingga, konflik dapat disimpulkan sebagai suatu kondisi yang tidak dapat dihindari, tetapi tetap dapat dikelola. Pernyataan ini diambil dengan melihat perspektif konflik yang berpandangan masyarakat sebagai sekelompok individu dengan berbagai kepentingan yang bersaing dan cenderung saling berkonflik satu sama lainnya (Narwoko, 2004: 97).

Menilik secara etimologis, kata konflik berasal dari kata kerja latin *configere* (“con” bersama, dan “fligere” benturan / tabrakan) yang berarti saling memukul / bertabrakan. Hal ini selaras dengan pengertian Glasl (2002) mengenai konflik, yaitu suatu kondisi adanya pertentangan atau ketidakcocokan antar individu, kelompok, ataupun organisasi di dalam

kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya Folger, Poolle dan Stutman (1993) menjelaskan bahwa pertentangan ini menghasilkan para pihak bertentangan tersebut untuk berusaha saling menjatuhkan / menggagalkan tercapainya tujuan dari pihak lain.

Kemudian, pandangan lainnya yang memperjelas mengenai konflik adalah sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan / kepercayaan (*perceived divergence of interest*). Maksudnya adalah suatu kondisi dimana keinginan ataupun harapan antar pihak tidak dapat direalisasikan secara simultan / bersamaan, sehingga membuahkan sebuah perasaan bertentangan. Perasaan tersebut cenderung bersifat sentral (*egoistic*) dalam pikiran dan tindakan seseorang, yang kemudian membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niat (intensi) seorang individu (Pruitt dan Rubin 2004:21). Sedangkan Galtung melihat konflik sebagai proses dinamis dimana struktur, perilaku dan sikap para aktor berkonflik selalu berubah dan saling mempengaruhi pihak satu sama lainnya (Mial, Ramsbotham dan Woodhouse, 1999).

Konflik secara sosiologis diartikan sebagai sebuah proses sosial antar dua individual atau lebih, maupun antara kelompok, yang mana salah satu pihak akan berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya (Tharaba, 2016: 51). Berbagai perbedaan pandangan perihal persoalan kehidupan dalam masyarakat dengan mengedepankan pandangan sendiri sebagai negasi dari pihak lain merupakan salah satu akar konflik yang sering terjadi (Soleh, 2009: 12).

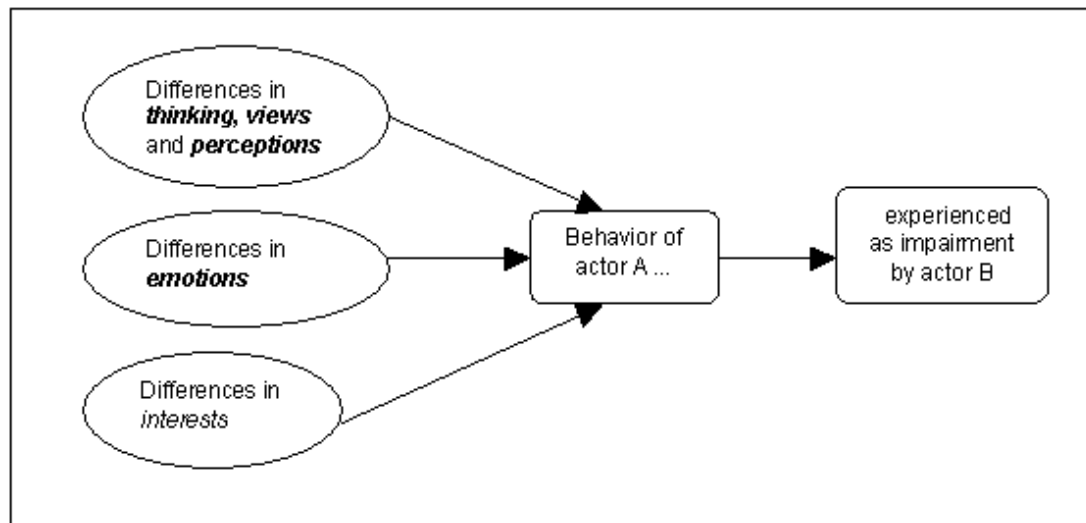
Akar pertentangan dalam konflik dapat berupa status, kekuasaan, ataupun sumber daya yang bersifat langka (Coser 1956). Menurut UCDP (Uppsala Conflict Data Program) terdapat empat jenis konflik, yaitu *intra-state*

conflict, *inter-state conflict*, *non-state conflict*, serta *extra-systemic conflict*. Konflik *intra-state* diuraikan sebagai konflik antara aktor pemerintah dengan aktor non-pemerintah yang tidak ada campur tangan negara lain didalamnya. Lalu konflik *inter-state* dijelaskan sebagai konflik antara dua atau lebih pemerintah akan suatu negara yang biasanya kemudian diselesaikan berdasarkan hukum internasional. Selanjutnya adalah konflik *non-state* yang merupakan pertentangan antara dua kelompok bersenjata yang terorganisasi, baik pemerintahan maupun non-pemerintah. Terakhir adalah konflik *extra-systemic* yang merupakan konflik antara pemerintah negara dengan pihak non-pemerintah negara tersebut di luar teritori negaranya sendiri.

Sedangkan Lewis A. Coser (dalam Poloma, 2003: 110) membedakan situasi konflik menjadi 2 garis besar berdasarkan akar konflik tersebut, yaitu konflik yang realistis dan tidak realistis. Konflik yang realistis berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan - tuntutan dalam hubungan ataupun dari perkiraan kemungkinan keuntungan para pihak, dan ditujukan kepada obyek kekecewaan tersebut. Di lain pihak, konflik yang tidak realistis adalah konflik yang bukan berasal dari fakta yang dapat dibuktikan secara *scientific* seperti agama ataupun kepercayaan lainnya dan sering kali sulit untuk dilihat kebenaran dari argumentasi pertentangan tersebut.

Selanjutnya, Sudarno (2002) merumuskan sosial sebagai suatu struktur atau komponen yang saling berkaitan dengan yang lain. Keterkaitan ini kemudian menghasilkan suatu tatanan hubungan - hubungan sosial dalam masyarakat yang menempatkan berbagai pihak tertentu, baik individu, keluarga, kelompok, maupun kelas, kedalam posisi sosial tertentu berdasarkan sistem nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat dan pada waktu tertentu pula. Hal ini memperjelas pengertian masyarakat

oleh Karl Marx dimana beliau melihat masyarakat sebagai pengklasifikasian antar kelas sosial dan tiap kelas memiliki peran tersendiri dalam sistem bermasyarakat.



Gambar 3. Penyebab Konflik Sosial

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik sosial adalah fenomena konflik (pertentangan) sebagai salah satu gejala di masyarakat yang diakibatkan oleh penekanan sifat pluralistik masyarakat dan ketidakseimbangan keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Konflik sosial juga sering kali dikaitkan dengan interaksi sosial yang tidak sempurna sehingga menyebabkan kesalahan komunikasi antar pihak. Konflik sosial dipandang sebagai pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk merebut aset-aset bernilai, terutama dalam bidang perekonomian. Kunci dari memahami konflik sosial adalah perbedaan dan keberagaman.

Alo Liliweri (2009) menguraikan definisi dari konflik sosial menjadi lima pengertian yakni sebagai berikut :

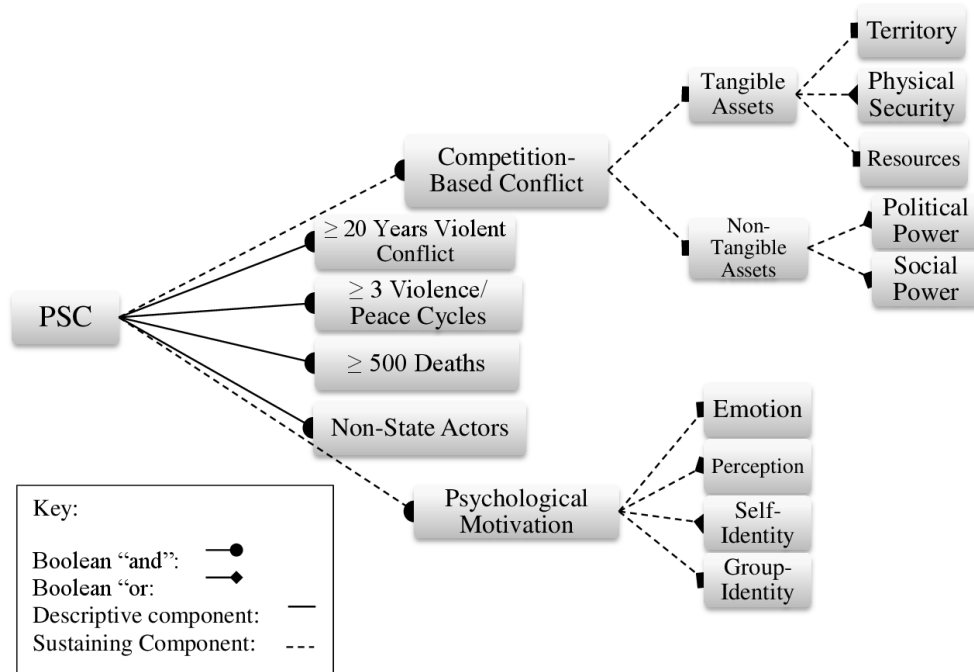
- Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu, kelompok, atau pihak terlibat, karena terdapat perbedaan sikap, kepercayaan, nilai dan kebutuhan.
- Hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih, yang memiliki / merasa akan objek tertentu, tetapi diliputi perasaan, pemikiran ataupun perbuatan yang tidak sejalan satu sama lainnya.
- Pertentangan atau pertikaian disebabkan adanya perbedaan dalam kebutuhan
- Suatu proses yang terjadi ketika satu pihak mempengaruhi pihak lain secara negative, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat orang lain terganggu.
- Bentuk pertentangan yang bersifat fungsional, karena pertentangan didukung tujuan kelompok dan membarui tampilan, namun difungsional karena menghilangkan tampilan kelompok (Liliweri, 2009: 249).

Kemudian dari beberapa definisi tersebut, Liliweri juga melihat bahwa dalam setiap konflik sosial terdapat empat unsur (Liliweri, 2009: 249), yakni:

- Terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat (Aktor)
- Terdapat tujuan yang menjadi sasaran konflik sosial tersebut (Kepentingan)
- Terdapat perbedaan pikiran, keinginan, serta tindakan dari aktor konflik untuk mendapatkan atau mencapai tujuan tersebut (Cara)
- Terdapat situasi konflik antara dua pihak atau lebih yang bertentangan (Kondisi)

Konflik sosial yang menyangkut pada hubungan sosial akan memiliki tingkat *antagonism*, ketegangan, dan perasaan negatif lainnya yang tertentu

dari perjalanan eskalasi konflik tersebut (Johnson, 1990). Perjalanan ini juga dapat dilihat dari perbedaan maupun persamaan yang ada secara objektif yang menyangkut jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, latar belakang budaya, ideologi, cara pandang, cita-cita, kepentingan, dan lain sebagainya.



Gambar 4. Skema Konflik Sosial yang Berlarut (PSY)

Menurut Merton (dalam Soekanto, 1983: 31), suatu permasalahan dapat disebut konflik sosial jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- Tidak adanya ketersesuaian antara nilai - nilai sosial dengan kenyataan serta tindakan sosial yang terjadi.
- Permasalahan tidak terjadi secara tiba – tiba melainkan terdapat gejala sosial maupun gejala bukan sosial yang menyebabkan terjadinya konflik sosial dimana jika ditelusuri akan menemukan akar konflik tersebut.
- Terdapat pihak pihak yang menilai permasalahan sebagai konflik atau tidak secara relatif objektif
- Adanya permasalahan sosial yang terbuka maupun tertutup akibat ketidaksukaan masyarakat akan tindakan yang menyimpang dan berlawanan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dalam kontan ruang dan waktu tertentu.

Sehingga, konflik sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan suatu masyarakat yang di rasa membahayakan kehidupan kelompok - kelompok sosial. Dengan kata lain, konflik sosial dapat menyebabkan terjadinya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan warga masyarakat di tengah – tengah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dalam masyarakat itu sendiri. Hal tersebut kemudian dapat berakibat disintegrasi sosial atau rusaknya ikatan sosial dan ketidakstabilan kemananan nasional.

Dalam penelitian ini, teori konflik sosial digunakan sebagai objek yang dikaji dalam pemindahan ibukota dimana potensi dari konflik sosial ini diasumsikan sebagai suatu kondisi yang membutuhkan perhatian khusus didalam perencanaan pemindahan ibukota kedepan. Teori ini juga dipakai

untuk menjelaskan hubungan yang berpotensi mengancam kestabilan keamanan nasional.

2.1.4. Teori Kebutuhan Manusia (*Human Needs*)

Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan dasar (*Human Needs*) yang sama. Melainkan dengan adanya perbedaan sosial budaya maupun aspek lainnya, maka kebutuhan tersebut pun secara khusus ikut berbeda secara prioritas. Dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seorang individu akan beradaptasi sesuai prioritas yang ada, dan apabila individu tersebut gagal untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka individu tersebut akan berpikir lebih keras dan bergerak untuk berusaha mendapatkannya (A. Aziz & Musrifatul, 2014). Kondisi inilah yang kemudian menghasilkan teori dimana menyebutkan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akan melahirkan konflik.

Kebutuhan dasar manusia dijelaskan oleh Virginnia Henderson sebagai suatu proses pemenuhan kebutuhan dalam melakukan aktivitas sehari – hari dalam tumbuh-kembang di rentang kehidupan (*life spend*) mereka. Selain itu Burton juga mendefinisikan kebutuhan dasar ini sebagai perjuangan pemenuhan yang sifatnya primordial dan universal dimana mendorong kemajuan tataran sosial (Burton, 1991: 82-83). Terlebih dalam masyarakat yang multikultural (majemuk), ketidakstabilan dan konflik tak mungkin dapat dihindari, sehingga untuk menjaga kestabilan masyarakat, diperlukan pemenuhan kebutuhan identitas dalam sistem sosialnya, terdapat keadilan yang merata, rasa penguasaan, serta kemungkinan memperoleh semua kebutuhan pembangunan masyarakat manusia lainnya (Burton, 1991: 21).

Burton kemudian beropini dalam teori kebutuhan manusia, konflik berkemungkinan muncul dari kebutuhan akan identitas, pengakuan, keamanan identitas sosial, dan nilai sosial lainnya. Hal ini juga dijelaskan konflik sering kali muncul akibat kebutuhan sebagai rasa frustrasi akan kondisi dan hubungan yang ada di masyarakat. Kategorisasi kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Burton antara lain; Keadilan merata, keamanan dan kenyamanan dari segala ancaman, rasa keberadaan, harga diri, pemenuhan diri, identitas, kelestarian budaya, kebebasan, dan partisipasi. Inti dari kebutuhan manusia Burton adalah kebutuhan tersebut erat diasosiasikan dengan nilai dan norma dalam sistem sosial di masyarakat.



Gambar 5. Teori Kebutuhan Burton

Sedangkan *Maslow's Need Hierarchy Theory* atau *A Theory of Human Motivation*, yang dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 melihat kebutuhan dan kepuasan seseorang meliputi kebutuhan biologis dan psikologis, berupa materiil dan non-materiil (Hasibuan, 2007: 104). Teori kebutuhan Maslow berbeda dari sebagian tokoh terkenal lainnya dimana Maslow mengkategorisasikan kebutuhan ini dalam suatu hubungan hierarki, sehingga ketika kebutuhan dasar terbesar sudah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya kemudian menjadi dominan. Dari sudut motivasi, teori maslow tersebut menjelaskan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang benar - benar terpenuhi seluruhnya, sebuah kebutuhan yang telah dipenuhi tidak lagi memotivasi (Robbins dan Timoty, 2009: 224).

Hierarki kebutuhan dasar manusia berdasarkan Maslow diantaranya;

- Kebutuhan Fisiologis (*physiological needs*)

Kebutuhan fisiologis (biologis) merupakan hierarki kebutuhan manusia yang paling dasar yang merupakan kebutuhan minimum untuk dapat hidup. Kebutuhan ini diuraikan meliputi sandang, pangan, papan atau lebih jelasnya seperti makan, minum, bernapas, terlindungi dari matahari, angin dan hujan, tidur, sex, dan lain kebutuhan primitive lain sebagainya.

- Kebutuhan Rasa Aman (*safety needs*)

Kebutuhan akan rasa aman meliputi segala keamanan secara fisik dan psikologis dari ancaman apapun yang dapat membahayakan diri indivisu tersebut. Kemanan fisik adalah seperti keamanan dan perlindungan dari bahaya kecelakaan, baku hantam, dan bahaya badan lainnya. Sedangkan keamanan psikologis lebih kompleks dan mencangkup ruang lingkup yang besar yaitu contohnya perlakuan

yang manusiawi dan adil, bebas dari rasa takut akan apapun (kesenjangan, ataupun tidak mendapat pekerjaan), dan lain sebagainya. (Siagian, 2012: 150-151)

- **Kebutuhan Sosial (*social needs / Love, Belongingness*)**

Meliputi kebutuhan untuk dapat bersosialisasi atau berhubungan dengan individu lainnya. Kebutuhan ini meliputi berbagai jenis hubungan sosial seperti persahabatan, afiliasi (hubungan antar pribadi yang harmonis), berada dalam komunitas, serta interaksi yang lebih erat dan intim dengan orang lain (percintaan, kekeluargaan, kerabatan, rasa kepemilikan, dll).

- **Kebutuhan Penghargaan (*esteem needs*)**

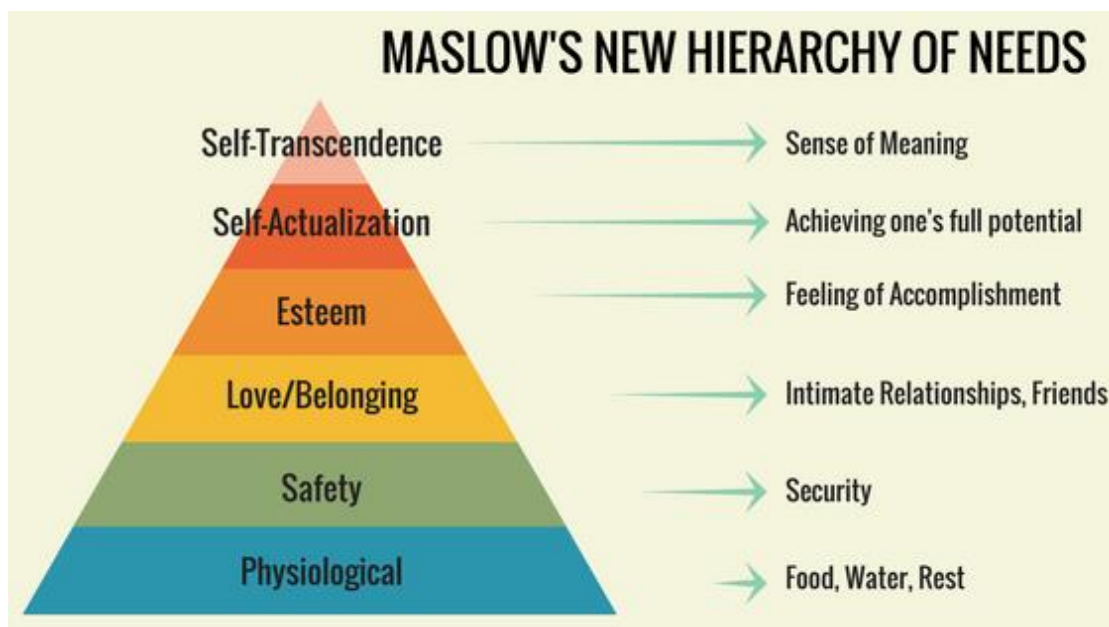
Kebutuhan penghargaan merupakan keinginan setiap orang untuk dihormati, dihargai, dan dibanggakan atas prestasi yang diraih dengan kemampuan dan keahlian seseorang maupun efektivitas kinerja (Sunyoto, 2013: 3). Maslow selanjutnya membagi kebutuhan akan penghargaan tersebut menjadi dua sub bagian, yakni penghormatan dari diri sendiri (*internal*) dan penghargaan dari orang lain (*external*). Sub internal mencakup hasrat keinginan individu untuk memperoleh kemenangan, kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan. Sedangkan sub external adalah penghargaan dari peraih sub internal tersebut dapat berupa pujian, pengakuan, piagam, tanda jasa, hadiah, kompensasi, insentif, prestige, status, reputasi, dan sebagainya. (Koeswara, 1995: 228-229)

- **Kebutuhan Aktualisasi Diri (*self-actualization needs*)**

Aktualisasi diri merupakan hierarki kebutuhan dari Maslow yang tertinggi dimana hanya akan tercapai setelah 4 kebutuhan dasar

lainnya telah terpenuhi dan dapat menggali potensi sesungguhnya yang ada secara optimal (Sunyoto, 2013: 3). Mereka yang telah mencapai level ini dapat dikatakan menjadi lebih manusiawi, lebih asli dalam mengekspresikan diri dengan kreativitas unik masing – masing individu, tanpa terpengaruh oleh arus budaya lingkungan.

- **Kebutuhan Melampaui Batas Diri (*self-transcendence*)**
Kebutuhan ini merupakan proses bergerak keluar dari diri / self dan menyatu atau terhubung dengan dunia yang lebih luas dari diri individu, yakni dunia Spiritual, Keberadaan dan Energi. Level ini juga disebutkan melampaui batas diri dan menyatu pada alam, jika pada level aktualisasi diri seorang individu akan lebih duniawi, maka kebalikannya transeden diri ini akan melepaskan nafsu duniawi mereka dan lebih menitikberatkan pada kesadaran akan kematian, refleksi, mediasi, dan lain sebagainya.



Gambar 6. Teori Kebutuhan Maslow

2.2. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian subbab penelitian terdahulu ini akan memuat beberapa penelitian yang relevan untuk membantu analisis atas persoalan yang diajukan. Penelitian-penelitian terdahulu itu nantinya akan membantu penulis dalam rangka proses penulisan dan perolehan data yang dimungkinkan untuk memperkaya temuan. Selibhnya penulis akan menjabarkan seluruh penelitian tersebut dalam satu tabel untuk memudahkan melihat perbedaan dan kesamaan yang ada antara penelitian yang lalu dengan penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan sejumlah empat penelitian terdahulu, yaitu;

2.2.1. Capital city relocation and national security: the case of Nigeria and Kazakhtan (Reva, 2016)

Penelitian ini melihat permasalahan pemindahan ibukota dan dampaknya pada keamanan nasional dengan melihat kasus pada pemindahan ibukota Nigeria dan Kazakhtan. Framework dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Buzan yang membagi keamanan nasional menjadi 5 sektor. Penelitian ini memperjelas hubungan pemindahan ibukota suatu negara dengan kondisi stabilitas keamanan nasional dari negara tersebut.

2.2.2. Locating the government: Capital cities and civil conflict. (Potter, 2017).

Penelitian ini mengargumentasikan pemindahan ibukota sebagai suatu upaya yang dapat menurunkan tingkat konflik sipil dalam negara plural. Hal ini disebutkan karena pemindahan ibukota ke daerah diluar perkotaan padat penduduk akan membatasi faksi yang

mendominasi pemerintahan dan memuaskan keinginan daerah yang kurang diperhatikan.

2.2.3. Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. (Yahya, 2018)

Peneliti dalam tulisan ini memberikan gambaran kenyataan akan urgesi pemindahan ibukota dengan mempertimbangkan beberapa lokasi. Peneliti juga memberikan uraian permasalahan di Jakarta yang menyimpulkan bahwa Jakarta memang sudah kurang efektif dalam perkembangan Ibukota Negara Indonesia kedepannya. Terakhir, peneliti menegaskan bahwa untuk masa depan yang lebih baik, negara harus bergerak maju demi kesejahteraan masyarakat.

2.2.4. Conflict Reality of the Implementation of Ngabul Village Market Relocation Policy. (Amri DKK, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Amri, Soesilowati, dan Arsal (2019) bertujuan untuk menguraikan konflik realitas dalam implementasi pemindahan pasar Ngabul. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat konflik sosial yang muncul akibat penolakan warga disebabkan perbedaan pendapat, kesalahan komunikasi, maupun disposisi yang tidak menguntungkan.

Berkenaan dengan uraian kesimpulan tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan, berikut peneliti menggambarkan matriks untuk dapat lebih melihat perbedaan dan persamaan setiap penelitian secara lebih

detail. Berikut matriks atas penelitian terdahulu yang dipakai sebagai salah satu referensi dalam penyusunan penelitian ini;

No	Judul dan Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Jurnal					
1.	<p>Judul Capital city relocation and national security: the case of Nigeria and Kazakhtan</p> <p>Peneliti Denys Reva (2016).</p>	Kualitatif Deskriptif- Analisis	Penelitian menunjukkan adanya hubungan tidak langsung antara pemindahan ibukota dengan keamanan nasional. Selain itu penelitian ini juga menganalisis kegagalan keamanan nasional pemindahan ibukota di dua negara tersebut.	Penelitian ini memberikan sebuah informasi tambahan mengenai hubungan pemindahan ibukota dengan keamanan nasional secara mendetail.	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang menitikberatkan pada keamanan nasional secara umum, sedangkan peneliti menitikberatkan pada potensi konflik sosial. Selain itu, analisis yang berbasis pada Nigeria dan Kazakhtan memiliki tingkat kompleksitas berbeda dengan Indonesia yang multicultural dengan masyarakat majemuk / plural.
2.	<p>Judul Locating the government: Capital cities and civil</p>	Kuantitatif Korelasi	Adanya korelasi antara pemindahan ibukota ke daerah luar perkotaan dengan penurunan konflik sipil.	Penelitian ini memberikan satu pandangan mengenai pemindahan ibukota dan	Perspektif penelitian ini melihat potensi konflik sosial dalam pemindahan ibukota dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai negara

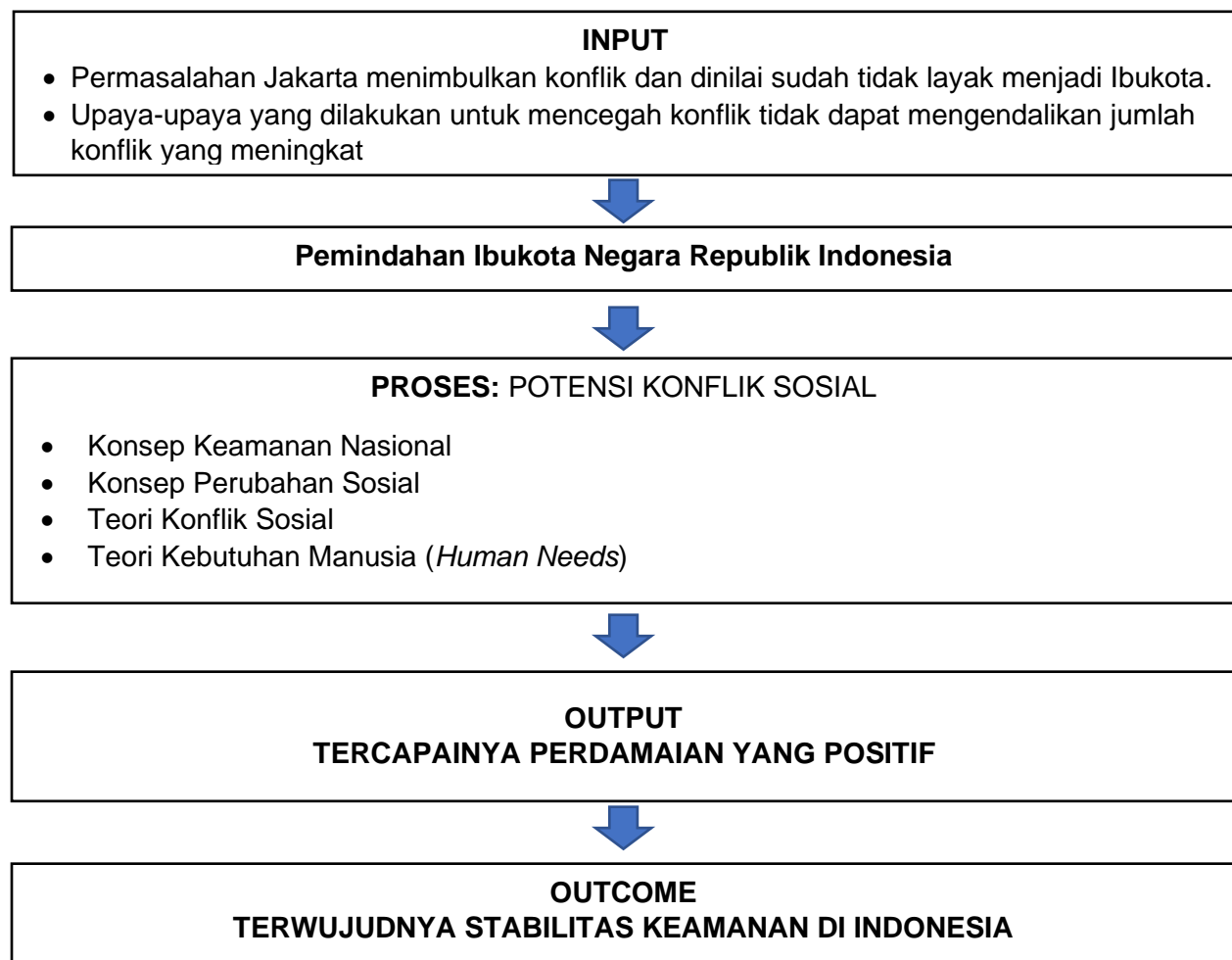
	<p>conflict.</p> <p>Peneliti</p> <p>Alan Potter (2017).</p>			<p>konflik.</p>	<p>multikultural, sedangkan penelitian Potter memakai sampel negara maju dengan masyarakat homogen.</p>
3.	<p>Judul</p> <p>Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera.</p> <p>Peneliti</p> <p>H.M. Yahya (2018)</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Penelitian ini mengargumentasikan urgensi dan kelayakan studi mengenai rencana pemindahan ibukota negara Indonesia. Dalam penelitian ini juga berusaha memperlihatkan realitas kondisi Jakarta sebagai ibukota yang mulai kurang layak dengan permasalahan yang tidak terkontrol. Sehingga disimpulkan untuk membangun negara yang maju dan sejahtera kedepannya, pemindahan ibukota merupakan langkah</p>	<p>Adanya urgensi pemindahan ibukota dikarenakan permasalahan yang tidak bisa lagi terkontrol di Jakarta. Keharusan persiapan matang untuk menjamin kelancaran agenda pemindahan ibukota ini terlebih melihat Indonesia dengan keragaman suku</p>	<p>Penelitian ini memiliki perbedaan pada objek kajian dan analisis. Penelitian ini lebih membuka dan mengargumentasikan kenapa pemindahan ibukota ini diperlukan dan belum mengkaji dampak yang akan ditimbulkan pada proses pemindahan ibukota tersebut. Selain itu, penelitian ini lebih kepada kajian sebelum diputuskannya rencana pemindahan ibukota secara resmi, sehingga kedalaman analisis dan konsep dari pemindahan ibukota itu sendiri masih</p>

			yang benar dan perlu dilakukan dengan persiapan matang	budaya.	belum berwujud.
4.	<p>Judul</p> <p>Conflict Reality of the Implementation of Ngabul Village Market Relocation Policy.</p> <p>Peneliti</p> <p>Syaiful Amri, Ety Soesilowati, & Thriwaty Arsal (2019)</p>	Kualitatif Studi Kasus	<p>Penelitian ini menemukan terjadinya konflik sosial dalam implementasi pemindahan pasar Ngabul akibat perbedaan posisi dan kewenangan antara aparat pemerintahan dengan masyarakat. Penelitian ini juga menghasilkan bahwasanya proses sosialisasi dan komunikasi dalam proses pemindahan menjadi kunci dari permasalahan yang timbul.</p>	<p>Penelitian ini memberikan sudut pandang mengenai konflik sosial yang muncul akibat pemindahan.</p>	<p>Penelitian ini hanya melihat dinamika secara local dimana pemindahan hanya sebuah pasar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan meliputi ruang lingkup nasional. Selain itu, penelitian Amri DKK juga melihat implementasi dan konflik yang sudah ada, dan penelitian peneliti menitikberatkan pada prediksi berdasarkan fakta dan studi kasus.</p>

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

2.3. Kerangka Berpikir

Penelitian ini disusun berdasarkan kerangka berpikir yang menguraikan kerangka teoritis potensi konflik sosial dalam pemindahan ibukota. Selanjutnya untuk mendukung teori konflik sosial, peneliti memakai teori *Human Need* dalam menjelaskan inisiasi dan tolak ukur. Penelitian ini selanjutnya mensintesakan hubungan antar teori dengan framework konsep Keamanan Nasional dalam menjelaskan urgensi penelitian, sedangkan konsep Perubahan Sosial untuk menjelaskan dan membuktikan potensi yang dihasilkan. Berikut merupakan kerangka berfikir pada penelitian ini;



Alur Pikir

POTENSI KONFLIK SOSIAL DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

